Hiswana Migas Khawatirkan Terjadi Kongkalikong Oknum PNS/TNI/Polri dengan SPBU

Kontribusi dari Ahmad Nas Imam
Jumat, 03 Agustus 2012

PURWOREJO, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menysinyalir pemerintah belum siap 100 persen dalam melaksanakan peraturan wajib menggunakan BBM non-subsidi bagi kendaraan berplat merah yang mulai berlaku 1 Agustus 2012. Bahkan Hiswana Migas mengkhawatirkan bakal terjadi penyimpangan yang melibatkan oknum PNS/TNI/Polri dan petugas SPBU. Demikian diungkapkan Sutarto Merti Utomo SE dari Hiswana Migas, dalam rapat koordinasi (rakor) penggunaan dan penghematan BBM bersubsidi, di ruang Arahiwang komplek Setda, beberapa waktu lalu. Rakor menghadirkan nara sumber dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Tengah, PT Pertamina pemasaran Kedu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), dibuka Assisten Sekda bidang Perekonomian, Pembangunan dan LH Ir Jumali.

Belum siapnya pemerintah itu menurut Sutarto, dapat dilihat dari payung hukum, stiker belum ada, maupun petugasnya. Demikian juga sanksi bagi pelanggar juga belum ditentukan, apakah kurungan, denda, adminsitrasi, atau sosial. Saat ini yag diharapkan bisa menekan baru sanksi sosial. Menurutnya, pelanggaran mungkin masih akan dilakukan oleh oknum PNS,TNI-Polri, yang menggunakan kendaran dinas. Modusnya antara lain penggantian plat nomor kendaraan dinas menjadi plat hitam. Bahkan terjadi kemungkinan kerja sama antara oknum PNS/TNI/Polri dengan petugas SPBU. Dalam melayani, petugas SPBU tidak akan mengambil risiko. Untuk itu, ia minta petugas SPBU mendapat perlindungan hukum. Diharapkan bila terjadi pelanggaran, yang memberikan sanksi atasan oknum tersebut. Sedangkan kendaraan milik pemerintah yang digunakan untuk angkutan umum seperti ambulans, pemadam kebakaran karena belum ada juknis nya maka tetap menggunakan BBM non subsidi. Sedangkan kendaraan bermotor yang menggunakan BBM jenis solar, masih mendapat subsidi. “Pemerintah belum siap seratus persen, namun aturan tersebut harus dilaksanakan. Makanya agar progran tersebut bisa berjalan, butuh komitmen semua pihak,” katanya. *